

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertahanan nasional adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Secara umum, pertahanan nasional seringkali terfokus pada ancaman militer, seperti serangan militer dari negara asing. Pertahanan penting bagi suatu negara karena dapat mencegah konflik, penindasan, dan kemiskinan dalam negara berkembang serta mencegah ketidakamanan di bagian lain dunia (Gompert et al., 2004). Akhirnya semua negara, terlepas dari ukuran atau kekayaannya, harus memiliki strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan mereka. Selain itu, pembangunan pertahanan yang sukses dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola yang baik, dan keamanan internasional.

Pandangan secara umum mengenai pertahanan yang terlintas dalam pikiran adalah aspek militernya karena merupakan bagian yang sangat terlihat dari sistem pertahanan nasional suatu negara. Namun, penting untuk diingat bahwa pertahanan nasional sebenarnya mencakup lebih dari sekadar kekuatan militer. Era globalisasi yang semakin kompleks, ancaman terhadap suatu negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup ancaman non-militer yang dapat berdampak serius terhadap stabilitas nasional. Salah satu bentuk pertahanan nasional yaitu pertahanan ekonomi yang merupakan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Pertahanan ekonomi merupakan upaya untuk melindungi dan memperkuat ekonomi suatu negara. Ancaman ekonomi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti krisis keuangan global, ketidakstabilan mata uang, perdagangan internasional yang tidak adil, ketidakstabilan pasar, kualitas sumber daya manusia, dan ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya strategis. Ancaman ini dapat mengganggu perekonomian suatu negara, mengakibatkan kerugian ekonomi yang

besar, dan pada akhirnya dapat membahayakan kedaulatan nasional. Negara-negara yang kuat dapat secara sadar memanfaatkan ketidakseimbangan ini untuk memperkuat posisi dan peran mereka di panggung internasional (Lizak et al., 2021). Bentuk pertahanan ekonomi dapat mencakup pengembangan infrastruktur, sistem komunikasi dan transportasi, hubungan perdagangan, dan jaringan pasokan komponen dalam sektor ekonomi yang strategis. Semua ini bukan hanya elemen perencanaan dalam proses ekonomi, tetapi juga elemen analisis yang berkaitan dengan keamanan dan keandalan pasokan dalam konteks sensitivitas terhadap gangguan yang mungkin timbul dari dimensi non-ekonomi interaksi internasional (Lizak et al., 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan fondasi kemajuan Masyarakat (Straubhaar Thomas, 2003). Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan dengan pengeluaran militer. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan memacu untuk meningkatkan pertumbuhan pengeluaran militer dan kemampuan militernya (Ma Jingxi et al., 2015). Jika dilihat secara dunia, rata-rata pengeluaran militer sebesar 2% dari GDP. Grafik dibawah ini merujuk data Worldbank yang menunjukkan perbandingan GDP dunia dengan pengeluaran militernya:



Grafik 1.1 Perbandingan GDP dengan Pengeluaran Militer

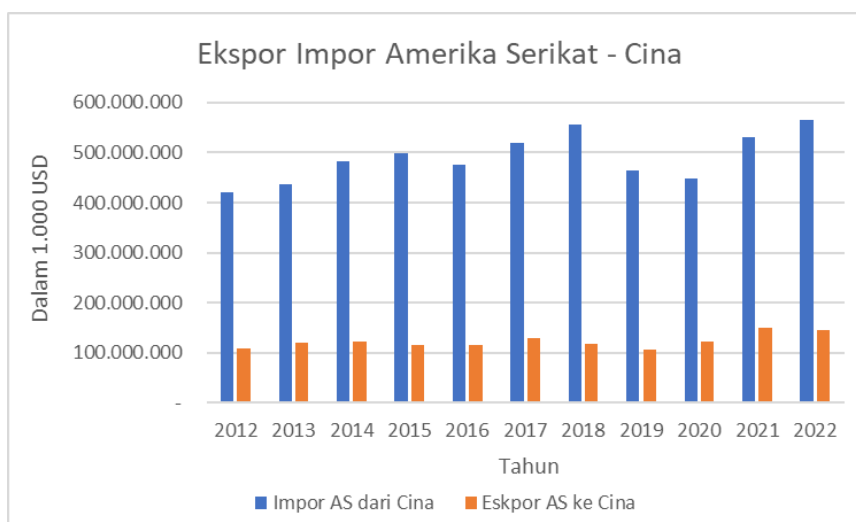
Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Pada umumnya negara-negara belum dapat memenuhi semua kebutuhan secara mandiri di tengah kompleksitas dan globalisasi. Penyebab negara belum mandiri bisa disebabkan keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang terbatas, kurangnya keahlian, ketertinggalan teknologi dan lain-lain. Pemerintah mempunyai peranan penting sebagai *regulator* perekonomian suatu negara (Tanzi, 1998). Pemerintah sebagai *regulator* menerapkan ekonomi pertahanan untuk mengelola kelemahan atau keterbatasan sumber daya negara demi tercapainya kebutuhan dasar masyarakat yang efektif dan efisien; dan tercapainya pertahanan ekonomi negara.

Perdagangan internasional merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat suatu negara. Negara-negara mengandalkan perdagangan internasional untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri (Grozdanovska et al., 2017). Saat ini, perdagangan internasional merupakan elemen yang sangat penting dalam perekonomian global dan memacu pertumbuhan ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Suatu negara berusaha memaksimalkan ekspor dengan berbagai kebijakan agar neraca perdagangan surplus.

Amerika Serikat dan Cina adalah dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Pada tahun 2018, kedua negara tersebut mulai terlibat konflik (Kalsie & Arora, 2019). Laporan United States Trade Representative (USTR) 2017 tentang Kepatuhan Cina pada WTO mengemukakan beberapa masalah penting yaitu kegagalan transparansi tentang perusahaan perdagangan; lambat dalam bergabung dengan Perjanjian Pengadaan Pemerintah; perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan WTO yakni mendukung ekonomi negara dan kebijakan industri yang bisa merugikan negara lain; masalah pada sektor layanan, pertumbuhan industri baja yang terlalu banyak; peraturan tidak konsisten, pembatasan investasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual; dan dampak campur tangan pemerintah dan Partai Komunis dalam perusahaan milik negara serta investasi asing. Laporan USTR tersebut yang didukung dengan neraca

perdagangan Amerika Serikat yang tercatat selalu defisit dengan Cina memicu kekesalan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang mencerminkan neraca perdagangan Amerika Serikat dengan Cina:



Grafik 1.2 Ekspor Impor Amerika Serikat - Cina

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Dari data diatas terlihat bahwa rentang persentase defisit neraca perdagangan ekspor-impor Amerika Serikat pada Cina mencapai 261% hingga 367%. Tahun 2018 Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan tertinggi selama 8 (delapan) tahun terakhir sebesar Rp437.157.018.000,00 atau sebesar 367% dari nilai Impor sebesar Rp556.164.827.000,00. Donald Trump melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi defisit perdagangan dengan Cina, salah satunya menerapkan kenaikan tarif impor. Cina juga melakukan hal yang sama untuk membalas kebijakan tersebut. Laman resmi USTR tanggal 22 Januari 2018, Presiden AS menginstruksikan USTR untuk mengenakan tarif pengamanan pada mesin cuci rumah tangga berukuran besar serta sel dan modul surya yang diimpor. Pada tahun Presiden AS menginstruksikan USTR untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen pada sekitar \$50 miliar impor dari China yang mengandung teknologi penting

secara industri termasuk yang terkait dengan rencana industri "Made in China 2025" (USTR, 2019).

Sejak awal tahun 2018 hingga 2021, rata-rata tarif AS untuk produk yang berasal dari Cina naik dari 3% menjadi hampir 20%, sedangkan rata-rata tarif Cina untuk produk AS melonjak dari 8% menjadi 21% (Purwono et al., 2022). Perang dagang Amerika Serikat dan Cina tidak memberikan dampak pengurangan defisit bagi Amerika (Kamal & Fuad, 2022; Kwon, 2018).

Bown (2021) merangkum kebijakan pengenaan tarif impor beserta pembalasannya yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dan Cina selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kebijakan Tarif AS-Cina Tahun 2018

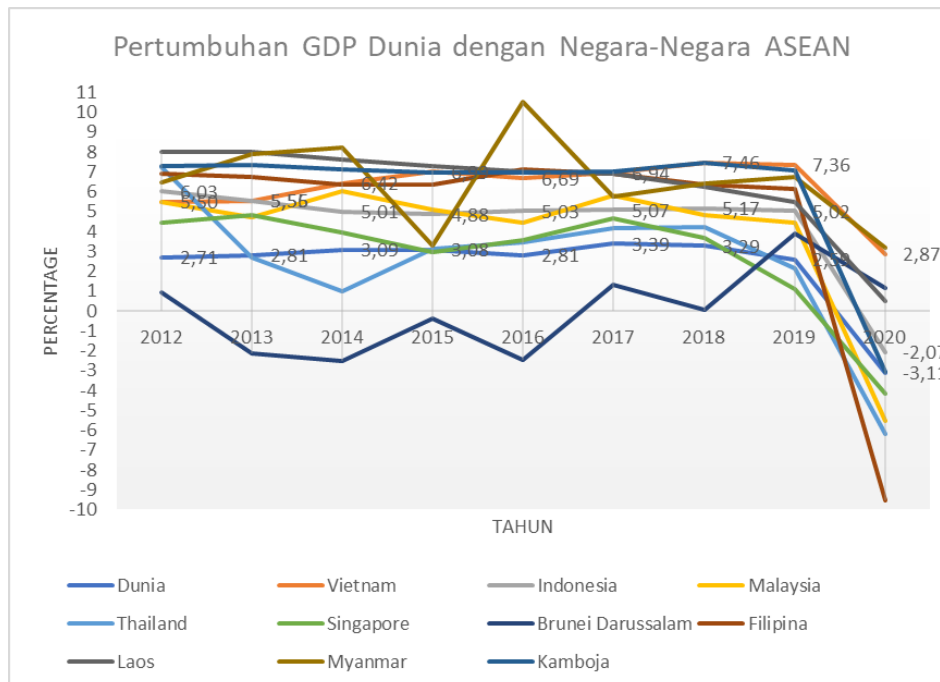
7 Feb	AS menaikkan tarif pasal 201 panel surya dan mesin cuci
23 Mar	AS menaikkan tarif pasal 232 baja dan aluminium (sementara waktu kecuali Argentina, Australia, Brasil, Uni Eropa, Kanada, Meksiko dan Korsel)
2 Apr	Pembalasan Cina terhadap tarif pasal 232
1 Mei	Cina menetapkan pemotongan tarif Most Favored Nation (MFN) obat-obatan
1 Jun	AS mengakhiri pengecualian tarif pasal 232 untuk baja dan aluminium kepada Uni Eropa, Kanada dan Meksiko (Argentina, Brazil dan Korea Selatan kesepakatan kuota)
1 Jul	Cina menetapkan pemotongan tarif MFN untuk produk konsumsi, otomotif dan produk IT
6 Jul	AS menaikkan tarif pasal 301 sebesar 25% (\$34miliar) dan pembalasan Cina (\$34miliar)
13 Agus	AS menaikkan tarif pasal 232 menjadi 50% baja dari Turki
23 Agus	AS menaikkan tarif pasal 301 sebesar 25% (\$16miliar) dan pembalasan Cina (\$34miliar)
24 Sept	AS menaikkan tarif pasal 301 sebesar 10% (\$200miliar) dan pembalasan Cina (\$60miliar)
1 Nov	Cina menetapkan pemotongan tarif MFN untuk barang industri

Sumber: Bown (2021)

Konflik perdagangan ini berdampak negatif terhadap perekonomian global mengingat besarnya kontribusi AS dan Cina terhadap output global

(Park S., 2020). Hal tersebut tercermin dengan menurunnya pertumbuhan GDP Dunia dimana tahun 2018 sebesar 3,29% turun menjadi 2,59% pada tahun 2019. Penelitian menunjukkan perang dagang memberikan dampak buruk bagi beberapa negara yaitu Korea (Dongyeol Lee, 2019; Park S., 2020), negara-negara Asia Tenggara lainnya (Kumagai et al., 2021; Tan et al., 2019) dan Eropa (Llano et al., 2021; Raju Huidrom et al., 2019).

Namun yang menjadi fenomena, salah satu penerima keuntungan dari perang dagang adalah Vietnam dimana pertumbuhan GDP mengalami kenaikan dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Beberapa penelitian menyatakan Vietnam merupakan negara yang menerima keuntungan dalam perang dagang Amerika Serikat – Cina yang dibuktikan dengan melonjaknya ekspor ke Amerika dan kenaikan penanaman modal asing (Choi & Nguyen, 2021; Ha & Duc Phuc, 2019; Kwon, 2018). Grafik dibawah ini merujuk data Worldbank yang mencerminkan pertumbuhan GDP dunia dengan negara-negara di ASEAN yaitu:

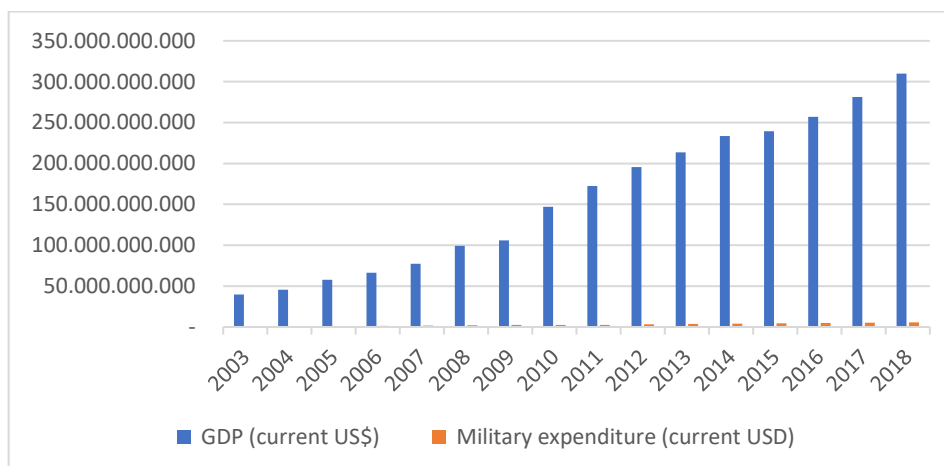


Grafik 1.3 Pertumbuhan GDP Dunia dengan Negara-Negara ASEAN

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Grafik menunjukkan perang dagang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia turun pada titik terendah dalam kurun waktu 8 tahun terakhir yaitu sebesar 2,59% pada tahun 2019. Penurunan pertumbuhan ekonomi dunia selaras dengan menurunnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN yang juga berada dititik terendah dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu sebesar 4,93% pada tahun 2019. Namun yang menjadi hal menarik adalah Vietnam memiliki pertumbuhan GDP tertinggi di ASEAN sebesar 7,36% dibanding rata-rata pertumbuhan GDP ASEAN sebesar 4,93 dan Indonesia sebesar 5,02%. Bahkan pada tahun 2018, Vietnam mencatat pertumbuhan GDP tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun sebesar 7,46%.

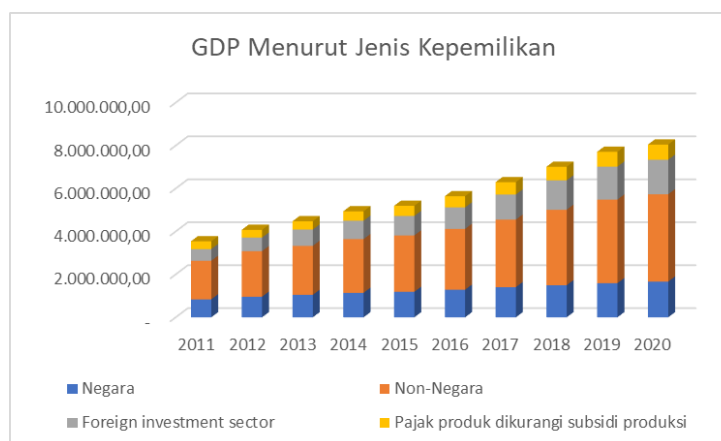
Grafik 1.3. juga menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP Vietnam selalu meningkat tiap tahun bahkan selalu melebihi pertumbuhan GDP dunia Peningkatan GDP Vietnam selaras dengan kenaikan anggaran pertahanan meskipun masih dalam persentase pada sekitaran 2%. Vietnam sebagai salah satu negara di sekitaran Laut Cina Selatan menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan tersebut. Vietnam mengambil sikap yang lebih tegas dan menyuarakan penolakannya terhadap klaim historis Tiongkok di Laut Cina Selatan (Sangtam, 2021). Peningkatan anggaran pertahanan Vietnam mencerminkan tekad untuk menjaga stabilitas dan keamanan, terutama di tengah ketegangan geopolitik. Keputusan Vietnam untuk meningkatkan kemampuan militernya dapat dilihat sebagai perlombaan senjata atau cara untuk mempertahankan status quo militernya (Hiswi, 2020). Grafik dibawah ini merujuk data Worldbank yang menunjukkan GDP dan anggaran pertahanan Vietnam:



Grafik 1.4 Perbandingan GDP dan Anggaran Pertahanan Vietnam

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

GDP Vietnam jika dilihat dari menurut jenis kepemilikan dapat diurutkan dimulai terbesar yaitu non-negara, negara, *foreign investment* dan pajak produk dikurangi subsidi produksi. Pada saat terjadinya perang dagang, persentase *foreign investment* dalam GDP rentan tahun 2018 s.d. 2020 mencapai 20% naik dari tahun 2017 sebesar 19%. Grafik merujuk data GSO Vietnam yang menunjukkan GDP menurut jenis kepemilikan:

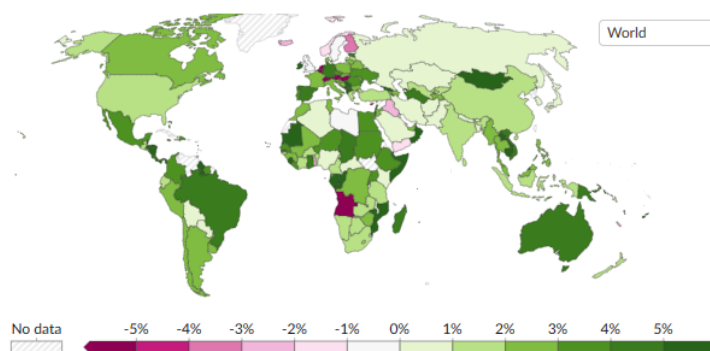


Grafik 1.5 GDP Menurut Jenis Kepemilikan

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Pada tahun 2018, Vietnam menerima *Foreign Direct Investment* yang tergolong tinggi. Penelitian (Ha & Duc Phuc, 2019) menyatakan bahwa terjadi peningkatan investasi langsung dari Cina ke Vietnam. CNBC Indonesia tanggal 4 Sept. 2019 menulis bahwa Worldbank menyatakan 33

industri Cina melakukan relokasi yaitu 23 industri merelokasi ke Vietnam dan 10 industri lainnya ke beberapa negara ASEAN lain kecuali Indonesia. Hasilnya, pertumbuhan PDB Vietnam naik dari 7% tahun 2018 menjadi 7,47% pada tahun 2019 sektor manufaktur menyumbang 30% pertumbuhan PDB (Liu dalam Voa Indonesia, 2020). Keberhasilan Vietnam dalam menarik FDI dipengaruhi berbagai faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan Vietnam menjadi negara tempat relokasi yaitu letak strategis Vietnam yang berbatasan langsung dengan Cina; upah buruh yang kompetitif; stabilitas ekonomi dan situasi politik di Vietnam juga menjadi pertimbangan penting; dan 13 Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) yang dimiliki (Laksono Vina Benita et al., 2020). Berikut gambar mengenai FDI, *Net Inflows as Share* GDP tahun 2018 pada negara-negara di dunia:

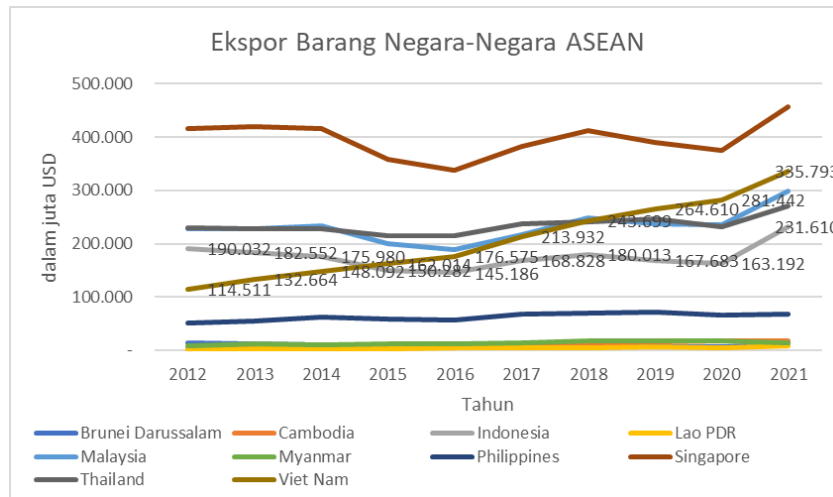


Gambar 1.1 Foreign Direct Investment, Net Inflows as Share of GDP 2018

Sumber: Ourworldindata (2023)

Vietnam merupakan negara dengan nilai ekspor terbesar kedua ASEAN dibawah Singapura Pada tahun 2019 hingga 2021. Tahun 2012 nilai eskpor Vietnam hanya sebesar USD114.511.000.000 dalam kurun waktu 9 tahun mengalami kenaikan hampir 300% menjadi USD335.793.000.000 pada tahun 2021. Prestasi ekspor Vietnam tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam kegiatan perdagangan internasional dengan memperluas jaringan perdagangan dan meningkatkan volume ekspor ke berbagai pasar global. Grafik dibawah ini

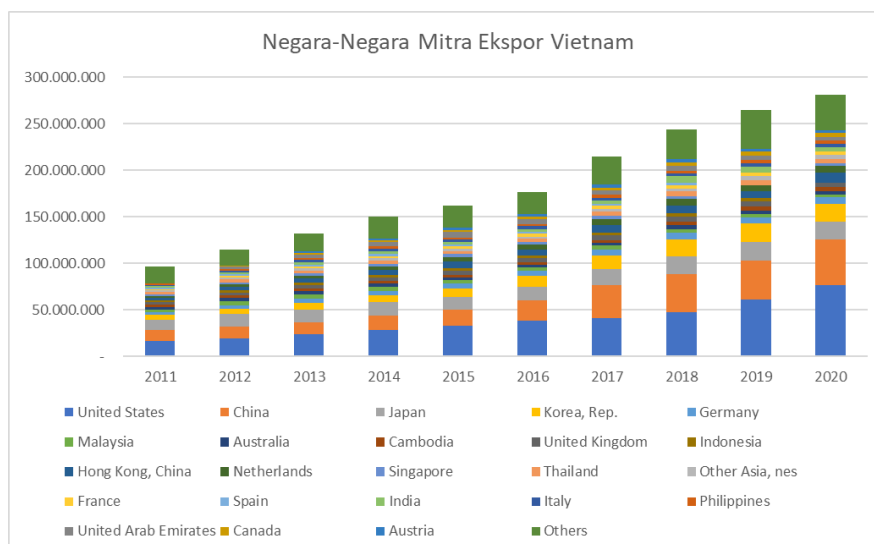
merujuk data ASEAN Statistical Yearbook 2022 yang menunjukkan ekspor barang negara-negara ASEAN dalam periode 2012 sampai dengan 2021:



Grafik 1.6 Ekspor Barang Negara-Negara ASEAN

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Tiga negara mitra ekspor Vietnam tertinggi adalah Amerika Serikat, Cina dan Jepang. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang mencerminkan kinerja ekspor Vietnam dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2020:

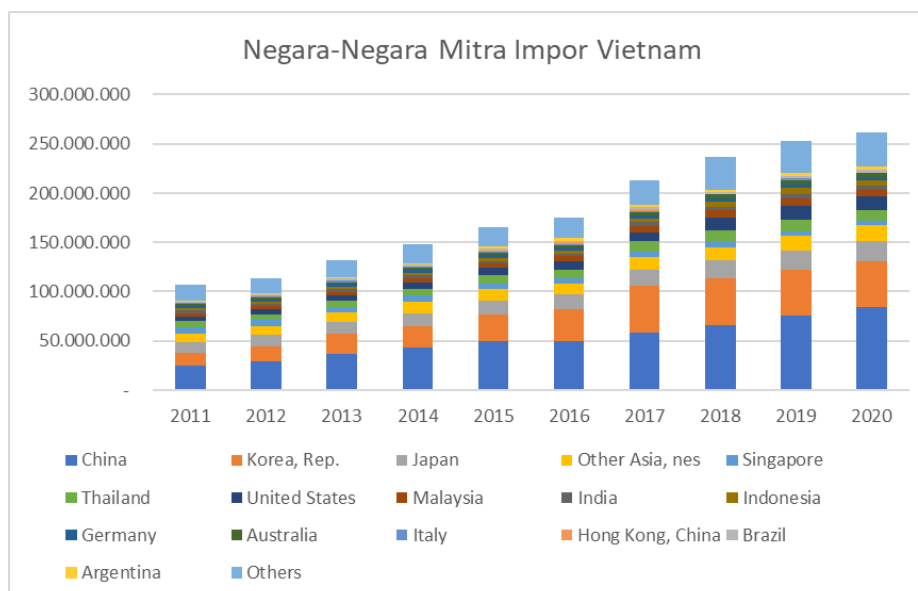


Grafik 1.7 Negara-Negara Mitra Ekspor Vietnam

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Perang dagang AS-Cina memberikan dampak terhadap kinerja ekspor impor Vietnam kepada kedua negara tersebut. (Choi & Nguyen, 2021) menemukan bahwa perang dagang menimbulkan efek pengalihan perdagangan, dimana impor AS dari Tiongkok menurun dan impor dari Vietnam meningkat. (Truong & Malesky, 2023) menegaskan dampak positif perang dagang terhadap ekspor Vietnam ke Amerika dan impor dari Tiongkok. Pada saat perang dagang, ekspor Vietnam ke Amerika Serikat mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2017 ekspor Vietnam ke Amerika Serikat sebesar 19% dari total nilai ekspor kemudian meningkat hingga sebesar 27% pada tahun 2020.

Sedangkan tiga negara mitra impor Vietnam tertinggi adalah Cina, Korea dan Jepang. Pada saat perang dagang, impor Vietnam ke Cina mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2017 impor Vietnam dari Cina sebesar 27% dari total nilai impor kemudian meningkat hingga sebesar 32% pada tahun 2020. Grafik dibawah ini merujuk data WITS Worldbank yang mencerminkan kinerja impor Vietnam dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2020:



Grafik 1.8 Negara-Negara Mitra Impor Vietnam

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Perang dagang Amerika Serikat dan Cina memberikan dampak perekonomian yang positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Perang dagang antara kedua negara raksasa tersebut dapat berlanjut ke tingkat berikutnya dan menciptakan tantangan perdagangan internasional yang serius (Zreik, 2022). Dampak negatif perekonomian dapat berubah menjadi ancaman nirmiliter pada pertahanan ekonomi Indonesia. Potensi terjadinya ancaman nirmiliter menjadikan kajian ini sangat penting untuk ekonomi pertahanan. Fenomena Vietnam mendapatkan keuntungan perang dagang Amerika Serikat–Cina (Choi & Nguyen, 2021; Ha & Duc Phuc, 2019; Kwon, 2018), maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Lesson Learned* Strategi Vietnam dalam Menghadapi Perang Dagang Amerika Serikat-Cina”.

1.2 Fokus dan Subfokus

1.2.1 Fokus Penelitian

Perang dagang Amerika Serikat-Cina yang memberikan dampak pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk Vietnam yang menerima dampak positif. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menetapkan fokus penelitian ini pada *Lesson Learned* Strategi Vietnam dalam Menghadapi Perang Dagang Amerika Serikat-Cina.

1.2.2 Sub Fokus Penelitian

Untuk mengetahui Strategi Vietnam dalam Menghadapi Perang Dagang Amerika Serikat-Cina, peneliti merumuskan sub fokus yang dalam penelitian ini adalah Strategi ekspor impor dan *Foreign Direct Investment* Vietnam dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat-Cina.

1.3 Rumusan Masalah

Vietnam merupakan salah satu negara yang mendapat keuntungan ekonomi dalam perang dagang Amerika Serikat-Cina, ini membawa pada pertanyaan penelitian: Bagaimana strategi Vietnam dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat dan Cina? Untuk menjawab pertanyaan

tersebut akan dikaji dengan menggunakan rumusan masalah yaitu Strategi ekspor impor dan *Foreign Direct Investment* yang diterapkan Vietnam dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat-Cina.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus, sub fokus penelitian, dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang membahas strategi Vietnam dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat dan Cina pada sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis strategi ekspor impor dan *Foreign Direct Investment* yang diterapkan Vietnam dalam menghadapi perang dagang Amerika Serikat-Cina
- b. Sebagai kajian akademik yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam menetapkan strategi yang tepat untuk memperoleh keuntungan dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat menjadi sumber literasi dan wawasan bagi para akademisi dan penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat dengan pengembangan aspek teori serta praktik dalam rangka pertahanan nirmiliter. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif dalam aspek teoritis dan praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sebuah referensi atau literatur yang sangat berharga bagi para akademisi dan praktisi di bidang pertahanan yang tertarik untuk mengembangkan ilmu pertahanan, khususnya dalam aspek ekonomi pertahanan yang terkait

dengan ekspor-impor dan FDI dalam rangka mendukung pertahanan negara. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada negara melalui pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai masukan, referensi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam menyusun strategi, kebijakan, atau peraturan perundang-undangan terkait ekspor-impor dan FDI dalam rangka mendukung pertahanan negara.